

POLRI NETRAL MENGHADAPI PEMILU 2009



WAKADIV HUMAS POLRI PADA ACARA PEMBUKAAN SOSIALISASI PAM PEMILU 2009 BERTEMPAT DI GEDUNG BAWARUTAR JAKARTA

Pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka keikutsertaan rakyat pada penyelenggaraan pemerintahan Negara sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD Negara RI 1945. Penyelenggaraan Pemilu yang sukses tentunya akan sangat diharapkan oleh masyarakat bangsa dan Negara yang ditandai dengan tergelarnya Pemilu dengan azas: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta diselenggarakan oleh penyelenggara yang mempunyai: integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas, demikian bagian amanat Kadivhumas pada upacara pembukaan Sosialisasi Pam Pemilu 2009 yang diselenggarakan di Jakarta beberapa waktu lalu.

Kegiatan sosialisasi Pam Pemilu 2009 dimanfaatkan sebagai kegiatan sosialisasi Pemilu 2009 oleh Divhumas Polri kepada mitra kerjanya (Komuniti Humas) dari seluruh partai peserta pemilu dan instansi/pihak terkait guna mensukseskan pelaksanaan Pemilu yang dalam waktu dekat akan digelar diseluruh wilayah NKRI termasuk Pemilu diluar negeri.

Pada bagian lain Kadivhumas Polri mengatakan bahwa agenda Pemilu 2009 yang sudah berjalan sejak tahun 2008 dan berakhir pada tahun 2009 yang insya Allah pada Oktober 2009 nanti merupakan acara Pemilu yang cukup panjang dan diperlukan kesiapan kita semua sesuai dengan peran dan *Tupoksi* kita dan kebersamaan sesama komponen bangsa.

Kegiatan sosialisasi Pam Pemilu 2009 dimanfaatkan sebagai kegiatan sosialisasi Pemilu 2009 oleh Divhumas Polri kepada mitra kerjanya (*Komuniti Humas*) dari seluruh partai peserta pemilu dan instansi/pihak terkait guna mensukseskan pelaksanaan Pemilu yang dalam waktu dekat akan digelar diseluruh wilayah NKRI termasuk Pemilu diluar negeri.

Polri menyikapi pelaksanaan Pemilu 2009 yang rencana

kampanye rapat umum Pemilu Legislatif 2009 dimulai tanggal 16 Maret 2009 dengan peserta Pemilu terdiri dari 39 partai dan 6 partai lokal di Nangroe Aceh Darussalam, sudah barang tentu bagi Polri yang bertanggung jawab dalam pengamanan Pemilu tersebut, tidak akan bisa berbuat banyak tanpa adanya partisipasi dan dukungan semua pihak untuk sama-sama terpanggil dalam ikut mengamankan dan mensukseskan Pemilu 2009.

Dengan semakin dekatnya pelaksanaan Pemilu kita merasakan suhu politik makin memanas, namun pada kesempatan ini perlu untuk disampaikan pada seluruh hadirin bahwa sikap Polri dalam Pemilu akan senantiasa menjaga netralitas sebagaimana komitmen yang disampaikan oleh bapak Kapolri,

Kita sama-sama memahami bahwa kehadiran massa dalam jumlah besar dalam giat kampanye dapat menimbulkan potensi gangguan dan kerawanan dalam bentuk ambang gangguan (AG) dan gangguan nyata (GN) dan bila tidak diantisipasi dengan baik akan

menjadi beban yang potensial, gangguan Kamtibmas, untuk mengamankan kerawanan yang diperkirakan akan timbul pada kampanye rapat umum antara lain:

1. Aksi anarkis terhadap fasilitas umum dan simbol-simbol Negara.
2. Kemacetan arus lalu lintas.
3. Konflik antar warga pendukung parpol dengan petugas.
4. Konflik antar Satgas Parpol.
5. Bentrokan antar massa pendukung Parpol.

Sebaliknya kita tentunya berharap bahwa dengan giat Pemilu utamanya pada masa kampanye rapat umum nantinya masyarakat antusias mengikuti giat kampanye dan aktivitas masyarakatpun tidak terganggu manakala kampanye Pemilu diselenggarakan dengan suasana kondusif. Maka disamping Polri dan instansi terkait melaksanakan giat pengamanan partisipasi partai Peserta Pemilu akan sangat diharapkan dengan mensosialisasikan melalui internal Partai masing-masing.

Dengan semakin dekatnya pelaksanaan Pemilu kita merasakan suhu politik makin memanas, namun pada kesempatan ini perlu untuk disampaikan pada seluruh hadirin bahwa sikap Polri dalam Pemilu akan senantiasa menjaga netralitas sebagaimana komitmen yang disampaikan oleh bapak Kapolri,

Pertama; menjaga netralitas agar tidak terseret oleh Partai Politik.

Kedua; menjaga profesionalisme dalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknya yang berhubungan dengan penegakan hukum dalam seluruh proses sengketa dan konflik dalam proses pesta politik nasional ini.

Acara sosialisasi pengamanan Pemilu 2009 dihadiri nara sumber antara lain: Baintelkan Polri dengan materi **"Potensi Konflik Dalam Pemilu 2009"**, dan Bareskrim Polri dengan materi **"Penegakan hukum dalam Pemilu 2009"**.

Sebagai penyeimbang pembahas dihadirkan: Anggota Bawaslu dengan materi **"Potensi pelanggaran Pemilu yang akan terjadi dalam Pemilu 2009"** dan Dirjen HAM dengan materi **"HAM dan Pemilu 2009"**.

Sebelum mengakhiri amanatnya Kadivhumas Polri pada acara Sosialisasi Pam Pemilu 2009 yang dihadiri para perwakilan Humas partai peserta Pemilu, perwakilan humas media massa, perwakilan humas LSM dan para Kabid dan Kabag Divhumas Polri mengharapkan melalui acara Sosialisasi Pemilu 2009 dapat membantu terselenggaranya Pemilu 2009 yang berkualitas sebagaimana yang kita harapkan. (nats)***

*Disarikan dari amanat Kadivhumas Polri pada acara pembukaan Sosialisasi Pam Pemilu 2009 bertempat di Hotel Borobudur Jakarta (Nats)****

PARA KAPOLDA DIHARAPKAN MEMBERIKAN INPUT DAN MELAPORKAN KEPADA SES NCB KENDALA DAN HAMBATAN PENGGELARANNYA PAM WILAYAH PERBATASAN NKRI



Kapolri saat berkunjung ke wilayah perbatasan wilayah NKRI

Merefleksikan kembali apa yang menjadi harapan dari pagelaran Rapat Koordinasi yang dimotori oleh Ses NCB Interpol yang nuansanya langsung ditangkap tentang perbatasan harus segera diangkat dan segera dijawab sebagai upaya yang harus menjadi prioritas bagi jajaran Polda yang memang memiliki wilayah berbatasan langsung dengan Negara-negara tetangga kita yang seharusnya perlu kita apresiasi. Seharusnya saya selaku Kapolri sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk memanggil para Kapolda setelah saya melihat di lapangan di Intikong dan di Biawak berkaitan dengan permasalahan yang ada di wilayah perbatasan secara kasat mata. Setelah saya melihat

langsung di lapangan ada rekomendasi yang harus ditindak lanjuti berbentuk kerjasama yang memang harus akhir bulan ini antara Kepolisian Diradja Malaysia dengan Kepolisian Brunai Darussalam, sudah harus kongkrit dan bulan Maret awak penggelaran kerjasama antara Kepolisian Malaysia Brunai Darussalam dengan Kepolisian Negara Indonesia sudah harus perlu dilaksanakan, demikian antara lain paparan Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri dalam acara Rakor Pengamanan Wilayah Perbatasan NKRI yang dilaksanakan pada tanggal 11 sampai dengan 13 Februari 2009 bertempat di Gedung Rupattama Mabes Polri Jakarta.

Lebih jauh Kapolri mengatakan ini sesuatu yang perlu dilakukan dan Satker NCB Interpol

melihat ini adalah sesuatu yang harus diangkat sebagai prioritas. Tema yang digunakan adalah **Akselerasi** yaitu percepatan bagaimana mekanisme kerjasama berkaitan dengan wilayah perbatasan darat atau perbatasan laut yang ada kaitannya dengan tugas pokok Polri. Menjaga keamanan dalam negeri yang tentunya korelasinya terkait dengan NKRI, perwujudan dari wibawa bangsa, dan perwujudan dari **trust** yang bisa kita angkat yaitu kepercayaan masyarakat. Tentunya hal ini sesuatu yang sangat mendasar, harus kita angkat karena berkaitan dengan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini juga diamanatkan pada UU No. 17 Tahun 2007. Bahwa tugas yang sekarang menjadi prioritas, untuk pengamanan wilayah perbatasan, tidak diamanahkan payung

hukumnya di Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang RPJM Nasional 2005-2025. Dalam Bab IV point 1-5 angka 4 disebutkan *Wilayah-wilayah perbatasan dikembangkan dengan mengubah arah pembangun yang selama ini cenderung berorientasi in world looking menjadi out world looking sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan Negara tetangga, dengan pendekatan pembangunan yang dilakukan selain dengan pendekatan yang bersifat keamanan yang diperlukan tentunya pendekatan kesejahteraan merupakan perhatian khusus yang diarahkan bagi pengembangan pulau-pulau kecil yang selama ini luput dari perhatian, ini amanah pertama yang dicantumkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2007. Kemudian dalam Bab IV 1-7 dalam angka 4 disebutkan dalam melakukan upaya pengamanan wilayah kedaulatan yurisdiksi dan asset NKRI yang meliputi kinerja pertahanan dan keamanan secara terpadu di wilayah perbatasan kemudian pengembangan pengamanan Sistem Monitoring Control Survairment (MCS) sebagai instrument pengamanan lingkungan dan wilayah kelautan dan mengoptimalkan pelaksanaan pengamanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terdepan dan peningkatan koordinasi keamanan dan penanganan pelanggaran di laut.*

Berangkat dari UU ini yang tercantum dalam angka IV di 1-5 dan 1-7 kita **break down** dengan **grand strategi** Kepolisi-

an Negara Republik Indonesia masuk dalam Grand Strategi 2005-2025 yang dibuat dalam Skep Kapolri No. 360, hanya dalam Skep Kapolri No. 360 ini dimungkinkan untuk direvisi, karena ada hal yang tentunya kontradiksi keinginan Polri yang tentunya berkaitan dengan **Marine Police** atau Polair yang kita miliki.

Dalam program akselerasi, ada program **Quick Win**, ada akselerasi peningkatan kualitas pembenahan wilayah perbatasan. Kondisi ril yang dihadapi oleh Polri adalah **pertama** saya menyampaikan terima kasih kepada para Kapolda yang ada di wilayah perbatasan yang telah membuat satu konsep untuk mengimplementasikan kebijakan tentang penggelaran wilayah perbatasan, namun kalau kita lihat, pemaparan dari Polda-Polda, saya selaku Kapolri melihat konsep pengamanan yang dibuat Polda-Polda peran itu masih dibebankan pada Polres dan Polsek, tanpa dijabarkan lebih jauh oleh kita semua. Tentang untuk melengkapi sarana dan prasarana serta struktur dan untuk memberdayakan masyarakat sebagai **buffer sun**, sebagai **belt**-nya tentu harus ada sinergisitas antara semua departemen dan instansi terkait. Konsep ini saya lihat waktu di Entikong kemarin, Malaysia satu sisi, patroli perbatasan mau mengajak Polri yang terdepan ada di Polda Kalbar, bingung kita mengimplementasikannya. Jadi kita melihat yang konsepnya ini konsep yang tidak bisa mencerminkan bahwa bentuk sistem metode Pengamanan Perbatasan Wilayah itu betul konprehensif nah ini tentunya perlu kita benahi kembali. Konsep yang

saya utarakan tadi mesti ditangani oleh Polsek dan Polres. Bagaimana kita pemberdayaan *Community Policing*. Bagaimana kita pemberdayaan *kearifal lokal*.

Kalau kita ambil contoh bahwa kehidupan barter perdagangan Biawak lebih tinggi dibandingkan dengan Entikong, sehingga kalau kita bangun Asrama Brimob atau asrama Polisi di sana dan ada infrastruktur yang baik kita ajukan untuk bisa jadi prioritas, tentu kita jawab tantangan tugas yang ada di wilayah itu.

Melalui kegiatan ini saya berharap, Polda bisa memberikan masukan kepada Mabes Polri, permasalahan apa yang mendasar yang dihadapi oleh para Polda dengan spesifikai karakter kerawanan wilayah diperbatasan.

Dengan kita mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh para Polda nanti di tahun 2010, dalam kita menyusun RKKAL Polda akan menyusun DIPA dan RKKALnya ada sinkronisasi dan Mabes Polri dan tidak berjalan sendiri, tetapi akan duduk bersama dengan Bapenas, Kimpraswil/PU, Kominfo, kita akan membangun sistem yang berkaitan dengan jaringan komunikasi, kita nempel, jadi anggaran tidak besar. Sehingga pegelaran sarana dan prasarana untuk mendukung di wilayah perbatasan betul-betul sudah masuk dalam satu sistem secara utuh yang sudah diidentifikasi oleh para Kapolda sekalian.

Kaitannya dengan kerjasama dengan luar negeri dengan Negara tetangga MoU apa yang sudah dibuat selama ini, implementasinya bagaimana, apakah ada masalah, apakah ada yang

tidak bisa dilaksanakan. Kalau ada permasalahan yang tidak bisa dilaksanakan apa benang merahnya yang harus kita angkat menjadi permasalahan di tingkat Mabes. Nanti dalam acara **coffee break** ke lapangan silahkan saja, tetapi ikut sertakan dari Derembang Polri, Intelijen Polri, Deops Polri sehingga kita semua nanti bisa melihat dan konsep yang akan dibuat, penggelaran dan tanggung jawab Polri yang diberi amanah melakukan tugas pengamanan di wilayah perbatasan benar-benar kita bisa lakukan tentunya dengan skala prioritas dulu. Tetapi dengan prioritas-prioritas tertentu minimal kita mampu menjawab tentang amanah yang diberikan kepada kita, sehingga pada tahun 2010 kita bisa menjawab. Kalau sekarang misalnya ada satu kejadian, saya selaku Kapolri diminta paparan di depan Bapak Presiden atau Menteri Polhukam konsep kepolisian dalam menggelar pengamanan di wilayah perbatasan pasti yang ada realitasnya enggak mungkin saya buat rekayasa.

Ini tentunya terpulang kepada para Kapolda untuk menyusun pada tahun 2010, dari penggelaran Rakor ini tentunya kita sudah bisa menginventarisir dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan mendasar yang harus diangkat oleh para Kapolda yang bisa ditarik **break down** dari bawah **bottom up** jangan **top down**, enggak selaras nanti dengan kondisi lapangan **bottom up** turun ke lapangan **recheck** masalah perbatasan apa di tiap Polda, dengan adanya inventarisir dan

identifikasi masalah apa yang perlu dibangun Derembang Polri dalam merumuskan RKKAL 2010, harus selesai dalam periode April 2009 ini.



Kapolri saat acara pembukaan Rakor Pengamanan Perbatasan NKRI

Dulu Babinkam Polri menyiapkan pagelaran 6 wilayah berkaitan dengan peran **Police Marine** Mabes Polri, hal ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan yang menjadi tugas kita agar tugas kita tidak diambil oleh orang lain. Oleh karena itu maka kita harus berupaya untuk sekuat tenaga melakukan upaya-upaya yang kongkrit yang dalam operasionalisasinya betul-betul semua pihak mengetahui bahwa Polri mempunyai konsep yang bisa terukur dan bisa dievaluasi dari berbagai aspek, sampai dengan **out come**-nya. Masyarakat bisa merasakan bahwa konsep Polri dalam pengamanan wilayah perbatasan wilayah darat sudah bisa menjawab tantangan kebutuhan yang diamanatkan dalam UU No. 2 Tahun 2002.

Masalah infrastruktur sarpras menyangkut personil komunikasi, transportasi sinergisitas dengan instansi lain kita bahas, sehingga DIPA 2010 yang dibuat oleh para Kapolda betul-betul sudah mencerminkan kebutuhan riil untuk membangun wilayah perbatasan satuan-satuan wilayah yang ada di perbatasan wilayah masing-masing.

Sebagai penutup Kapolri menyoroti yang berkaitan dengan kerjasama dengan Negara tetangga dalam bentuk apapun, para Kapolda diharapkan memberikan **input** kepada Ses NCB dan melaporkan apa yang menjadi kendala yang tidak bisa dilaksanakan, prioritas penggelarannya, dengan demikian kita akan duduk bersama pada saat **SOP**, terutama dengan Kerajaan Diraja Malaysia dan Brunai Darussalam. Isu yang kita angkat **terorisme, arms-muggling, trafficking persons, kejahatan dengan kekerasan dan ranmor**. Dengan SOP yang kita rumuskan mengimplementasikan apa kehendak kita, apa yang bisa kita tampung keinginan mereka, sehingga kita bisa cari solusi masalah-masalah yang kaitannya dengan **police to police**, polisi dengan polisi.

Disarikan dari amanat Kapolri pada acara pembukaan Rakor Pengamanan Perbatasan NKRI bertempat di Rupattama Mabes Polri Jakarta. (nats)***

PERANAN MEDIA MASA DALAM PEMILU 2009



Kita pahami bersama bahwa pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam menjalankan fungsi jurnalistik tersebut maka kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, *bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagaimana ditetapkan*

dengan Undang-Undang, demikian antara lain sambutan Kapolri pada acara silaturahmi dengan para pimpinan Redaksi Media Massa yang diselenggarakan di Gedung Rupattama Mabes Polri Jakarta beberapa waktu lalu.

Lebih jauh Kapolri mengatakan bahwa kegiatan jurnalistik merupakan faktor penting dalam kehidupan masyarakat sebagaimana peran pers yang diatur dalam Pasal 6 UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers yaitu :

1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.
2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan

hak asasi manusia serta menghormati kebhinekaan.

3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
4. Melakukan pengawasan kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran sehingga dilindungi oleh Undang-undang.

Dengan adanya peran pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut dan melihat kenyataan yang terjadi selama ini, maka pers memiliki peran sangat penting bila dikaitkan dengan fungsi dan peran Polri dalam pembinaan Kamtibmas,

terlebih lagi dalam era globalisasi saat ini, dimana informasi seolah tidak ada batas ruang dan waktu sehingga informasi yang masuk dan disebarluaskan kepada masyarakat harus dikelola dengan seksama agar tidak kontra produktif dan dapat merugikan masyarakat.

Oleh karena itu penyiaran informasi harus dapat memberikan nilai positif dan ideal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Undang Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang menyatakan bahwa penyiaran diarahkan untuk :

1. Menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
4. Menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional.
6. Menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup.
7. Mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di

- bidang penyiaran.
8. Mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi.
9. Memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab.
10. Memajukan Kebudayaan Nasional.



Kapolda Jakarta bertemu dengan Pemred Media Massa dihadiri oleh para Pemred dan Wartawan senior

Mengacu pada ketentuan tersebut maka keberadaan pers sebagai wahana informasi akan dapat menjadi pendorong utama dalam pembangunan masyarakat bangsa dan negara. Terkait hal tersebut, salah satu agenda nasional saat ini berada di hadapan kita adalah penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pilpres tahun 2009. Dalam waktu yang sudah dijadwalkan kita memasuki kampanye yang dilakukan secara terbuka oleh 38 partai politik peserta Pemilu yang akan berlangsung selama 21 hari. Berdasarkan pengalaman Pemilu sebelumnya masa kampanye memiliki potensi kerawanan yang cukup memerlukan perhatian kita

dengan seksama, demikian halnya dengan tahapan kegiatan Pemilu lainnya.

Untuk mengantisipasi berbagai potensi kerawanan yang terjadi, agar tidak berkembang menjadi gangguan Kamtibmas yang dapat mempengaruhi jalannya Pemilu maka Polri telah melakukan serangkaian kegiatan operasi baik yang bersifat preventif maupun penegakan hukum untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif sehingga dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Sebelum mengakhiri sambutannya Kapolri mengatakan bahwa Insan pers dan pengembang fungsi jurnalistik memiliki peran yang sangat penting untuk mewujudkan keinginan tersebut sehingga patut kiranya bagi kita sekalian untuk saling mendukung dan saling kerjasama dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang mantap untuk menjamin kesuksesan pelaksanaan Pemilu 2009. *"Selaku Kapolri saya yakin dengan kebesaran jiwa dan kepedulian yang tinggi dilandasi dengan tekad dan semangat untuk memperjuangkan masa depan bangsa dan Negara yang lebih baik, apa yang dilakukan saat ini akan dapat mewujudkan masyarakat yang aman, damai, makmur dan sejahtera".* *** (Nats)

Disarikan dari Sambutan Kapolri pada acara silaturahmi dengan para pimpinan Redaksi Media Massa yang diselenggarakan di Gedung Rupattama Mabes Polri Jakarta.